Vol 7, No. 1, April 2026

E-ISSN : 2775-443X
P-ISSN : 2775-4421

KONSEP INTERAKSI STAKEHOLDERS PADA PROYEK PENGEMBANGAN HUTAN KOTA DAN HUTAN MANGROVE KOTA LANGSA DENGAN INTERFACE MANAGEMENT SYSTEM (ISM)

STAKEHOLDER INTERACTION IN THE DEVELOPMENT OF URBAN FOREST AND MANGROVE AREAS IN LANGSA CITY USING AN INTERFACE MANAGEMENT SYSTEM (IMS)

Puteri Hanifah Hanni[1)], Ipak Neneng MB[2)], Muhammad Zacky Ardhyan[3)]
[1,2,3] *Prodi Teknik Sipil, Universitas Samudra, Jl, Meurandeh, Langsa*
email: puterihanifahanni@gmail.comi[1)]

Abstrak

Kawasan RTH Taman Hutan Kota dan Ekowisata Hutan Mangrove di Kota Langsa memiliki potensi besar dalam mendukung pengembangan pariwisata daerah. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan kawasan ini melibatkan berbagai *stakeholders* dengan peren dan kewenangan yang berbeda, sehingga memerlukan koordinasi lintas sektor yang efektif. Namun, koordinasi yang ada saat ini masih menunjukkan ruang untuk peningkatan, khususnya dalam menyelaraskan perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan kawasan wisata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola interaksi antar *stakeholders* yang terlibat, serta mengembangkan konsep interaksi dalam *Interface Management System* (IMS) yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi antar *stakeholders*. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan *Soft Systems Methodology (SSM)* melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan. Analisis data dilakukan menggunakan elemen *CATWOE* dan model konseptual untuk memahami hubungan antar instansi dengan merumuskan solusi sistemik terhadap permasalahan *interface* yang muncul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengelolaan kawasan wisata telah berjalan, namun masih bersifat sektoral dan administratif, sehingga koordinasi antar instansi belum sepenuhnya terintegrasi. PT. Pekola sebagai pengelola kawasan menjalankan fungsi operasional sesuai kewenangannya, namun dalam beberapa aspek masih memerlukan dukungan kebijakan dan penganggaran dari Pemerintah Kota Langsa. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan penerapan *IMS* melalui pembentukan divisi koordinatif di bawah Sekretariat Daerah (Setda) Kota Langsa sebagai pusat komunikasi dan pengawasan pariwisata. Implementasi sistem ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan, dan mendukung tata kelola pariwisata yang berkelanjutan di Kota Langsa.

Kata kunci: *interface management system (IMS)*, pt. pelabuhan kota langsa (perseroda), pengelolaan kawasan wisata, *stakeholders*, *soft system methodology (SSM)*

Abstract

The RTH City Forest Park and Mangrove Forest Ecotourism area in Langsa City have significant potential to support regional tourism development. In practice, the management of these areas involves multiple stakeholders with different roles and authorities, requiring effective cross-sectoral coordination. However, existing coordination still shows room for improvement, particularly in aligning planning, implementation, and maintenance of tourism areas. This study aims to analyze

E-ISSN : 2775-443X
P-ISSN : 2775-4421

the patterns of interaction among the stakeholders involved and to develop an interaction concept within an Interface Management System (IMS) that can be applied to enhance the effectiveness of cross-sectoral coordination. The research adopts a qualitative method using the Soft Systems Methodology (SSM) approach through in-depth interviews and field observations. Data were analyzed using CATWOE elements and conceptual models to understand inter-institutional relationships and to formulate systemic solutions to emerging interface issues. The results indicate that the tourism area management system has been implemented but remains sectoral and administrative in nature, resulting in coordination among institutions that is not yet fully integrated. PT. Pekola, as the area manager, carries out its operational functions according to its authority; however, in several aspects, it still requires policy and budgetary support from the Langsa City Government. Therefore, this study proposes the implementation of IMS through the establishment of a coordinating division under the Regional Secretariat (Setda) of Langsa City as a center for communication and tourism oversight. The implementation of this system is expected to improve management efficiency and support sustainable tourism governance in Langsa City.Abstracts are written in English (with a title), maximum of 250 words accompanied by 3-5 keywords, typed in Times New Roman font 10, made in one paragraph without subtitles consisting of background, objectives, research methods, results, conclusions.

Keywords: *interface management system (IMS), pt. pekola (perseroda), tourism area management, stakeholders, soft system methodology (SSM)*

1. Latar Belakang

Penerapan interface management belum sepenuhnya diterapkan pada proyek wisata di Kota Langsa, khususnya pada kawasan wisata RTH Taman Hutan Kota dan Ekowisata Hutan Mangrove Kota Langsa, padahal kompleksitas pengadaan dan banyaknya stakeholders yang terkait dalam proses pengembangan kawasan dapat menimbulkan beberapa masalah *interface*. Banyaknya pihak yang terlibat dalam proyek biasanya menyebabkan terjadinya permasalahan dalam koordinasi ataupun komunikasi, hal ini juga dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya kegagalan proyek pengembangan (Shokri et al., 2016). Untuk meminimalisir terjadinya konflik atau permasalahan dalam berjalannya proyek, perlu dibuatnya titik kontak antara *stakeholders* untuk mempermudah interaksi dan pertukaran informasi. S*takeholder* adalah individu, kelompok atau organisasi yang dapat mempengaruhi, dipengaruhi atau menganggap diri mereka dipengaruhi oleh keputusan, kegiatan, atau hasil dari sebuah proyek (PMBOK® Guide, 2013).

Keberhasilan dalam menyelesaikan proyek pembangunan bergantung kepada koordinasi, kerjasama, dan komunikasi yang baik antara pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan. *Interface Management* merupakan cabang ilmu manajemen yang berfokus kepada manajemen komunikasi dan tanggung jawab para pihak dalam sebuah organisasi proyek untuk dapat berkerjasama dengan sebaik baiknya dalam upaya menghasilkan produk sesuai dengan yang diharapkan (Chan et al., 2005).

Hasil observasi awal menunjukkan bahwa PT. Pelabuhan Kota Langsa (Perseroda) sebagai pihak pengelolah kawasan wisata RTH Taman Hutan Kota dan Ekowisata Hutan Mangrove Kota Langsa belum sepenuhnya menerapkan *interface management*. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan timbulnya beberapa masalah *interface* atau permasalahan yang terjadi pengelolaan kawasan, antara lain *financial problems* yang disebabkan oleh menurunnya jumlah pengunjung pada sektor pariwisata ini dan *enviromental problems* yaitu kurangnya penangan lebih lanjut pada fasilitas-fasilitas yang sudah rusak atau tidak layak pakai. Oleh karena itu dilakukannya penelitian ini yang bertujuan untuk menganalisis pola interaksi antar *stakeholders* serta mengembangkan *konsep interface management* yang ada kemudian divisualisasikan dalam model konseptual.

Beberapa Penelitian terdahulu tentang interaksi dan koordinasi antar *stakeholders* dalam proyek pengembangan konstruksi berbasis *interface management* antara lain studi

E-ISSN : 2775-443X
P-ISSN : 2775-4421

yang berjudul: *Interface Management* pada *Inter-Public Infrastructures System* Ruang Milik Jalan oleh (Neneng et al., n.d.) dan *Stakeholders Interaction Framework of Utilities Development in and Adjacent to the Public Right of Way in Indonesia oleh* (Bukit et al., 2019); dan Shokri et al., (2012)yang melakukan studi tentang definisi *interface* dan *interface management.* Kemudian beberapa penelitian tentang *stakeholders analysis* dan pola interaksi antar *stakeholders*, antara lain: (Wang & Aenis, 2019 dan Neneng et al., 2025). Literatur yang dapat membantu dalam mengembangkan *soft system methodology (SSM)* antara lain: (Checkland, 2000). Sedangkan artikel (Karay et al., 2020) menggunakan *soft system methodology (SSM)* untuk membangun model konseptual pada sistem yang belum terstruktur.

2. Metode Penelitian

Data yang dibutuhkan dalam penelitian in terdiri atas:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari objek penelitian. Data primer yang dibutuhkan dan digunakan dijelaskan dlam Tabel 1.

Tabel 1 Struktur data primer

No	Tujuan	Informasi yang Dibutuhkan	Metode	Jumlah Responden	Responden
1	Identifikasi pola interaksi antar *stakeholders* .	Pihak-pihak yang terlibat dalam proyek pembangunan Hutan Kota dan Hutan Mangrove Kota Langsa.	Wawancara mendalam *(in-depth interview)*	7	Direktur Operasional & Keuangan PT.PEKOLA
					Manager RTH Taman Hutan Kota Langsa
		Hubungan atau interaksi antar pihak-pihak yang terlibat dalam proyek pembangunan.			Staf Aset dan Perlengkapan Hutan Kota Langsa
2	Identifikasi aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam *Interface Management.*	Waktu interaksi atau kerjasama antar stakeholders tersebut.			Staf Keuangan Hutan Kota Langsa
		Besar ketergantungan antara PT.PEKOLA dengan stakeholders yang ada.			Manager Ekowisata Hutan Mangrove Kuala Langsa.
		Sistem pendataan yang dilakukan oleh PT.PEKOLA dengan stakeholders selama masa proyek pembangunan.			Staf Administrasi dan Keuangan Ekowisata Hutan Mangrove Kuala Langsa.
		Sistem manajemen aset yang dilakukan oleh PT.PEKOLA selama masa proyek pembangunan.			Korlap Ekowisata Hutan Mangrove Kuala Langsa
		Regulasi dan kontrak kerja antar PT.PEKOLA dengan stakeholders yang ada.			

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh narasumber, bukan berdasarkan observasi ataupun wawancara dari peneliti. Data sekunder pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Struktur data sekunder

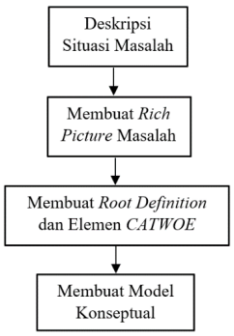
No	Keperluan Data dalam Penelitian	Data yang Diperlukan	Instansi atau stakeholders	Sumber Data
1	Untuk mengidentifikasikan hubungan interaksi dan kerjasama antara PT.PEKOLA dan *stakeholders* yang terlibat dalam pengembangan proyek pembangunan Hutan Kota dan Hutan Mangrove Kota Langsa.	Daftar Data Infrastruktur PT.PEKOLA	Dinas PUPR Kota Langsa	Kantor PT.PEKOLA Kota Langsa
			Bappeda Kota Langsa	
			Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa	
			Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota	
			UPTD KPH III Dinas Kehutanan Aceh	
			Komunitas Penggiat Alpukat Kota Langsa	

E-ISSN : 2775-443X
P-ISSN : 2775-4421

Data primer dan data sekunder dalam struktur data di atas akan digunakan dalam analisis data untuk mendapatkan pola interaksi antar instansi/stakeholders yang terlibat di kedua kawasan hutan.

c. Teknik Analisis Data

Setelah menentukan struktur-struktur data penelitian, hal yang dilakukan selanjutnya ialah analisis data hasil wawancara. Metode analisis data yang digunakan adalah *Soft System Methodology (SSM)*. 4 langkah dalam membuat model *SSM* pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1 4 Langkah membuat model SSM

3. Hasil dan Pembahasan

a. Identifikasi Stakeholders yang terlibat

Setelah dilakukannya wawancara mendalam dengan narasumber dari pihak PT. Pekola, berhasil diidentikasi instansi-instansi yang bekerjasama dalam proyek pengembangan kedua kawasan hutan. Nama instansi-instansi terkait serta komunitas terkait dengan PT. Pekola adalah sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Langsa (DLHK)
2. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Langsa (Disporapar)
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Langsa (PUPR)
4. Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa (DPPKP)
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa (BAPPEDA)
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Langsa (BPKAD)
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Kota Langsa
9. Dinas Komunikasi & Informatika Kota Langsa
10. Komunitas Penggiat Alpukat (KPA)
11. Masyarakat Sekitar (terkait parkir, kantin, café, asongan, dll)

Jenis kerjasama yang dilakukan dijelaskan dalam Tabel 3, sebagai berikut:

Tabel 3 Jenis kerjasama yang dilakukan

No	Nama Instansi	Interface	Jenis Kegiatan
1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK)	Terkait dengan perizinan, pengelolaan lingkungan dan kebersihan serta terlibat dalam pembangunan dan pemeliharaan aset (fasilitas) pada kawasan proyek pengembangan.	1. Perizinan DLHK diperlukan untuk pembukaan kawasan wisata secara publik. 2. Pengelolahan dan pengangkutan sampah.

E-ISSN : 2775-443X
P-ISSN : 2775-4421

			3. Pembangunan dan pemeliharaan kandang hewan di RTH Taman Hutan Kota.
2	Dinas kepemudaan, olahraga dan parawisata (Disporapar)	Berperan aktif dalam perencanaan, pembangunan, dan promosi fasilitas pada kawasan wisata.	1. Pembangunan dan pemeliharaan beberapa aset besar di kedua kawasan wisata ini, misal: Tower di Ekowisata Hutan Mangrove, Rumoh Aceh di RTH Taman Hutan Kota, dll. 2. Terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pariwisata, dan mendukung operasional pengelolaan kawasan secara berkelanjutan.
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Langsa (PUPR)	Terkait beberapa pekerjaan infrastruktur.	Terlibat dalam pekerjaan teknis dalam pembangunan waduk danau di RTH Taman Hutan Kota Langsa.
4	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa.	Terkait kepemilikan beberapa aset bangunan, fasilitas atau pun perlengkapan di RTH Hutan Kota dan Ekowisata Hutan Mangrove.	Berkontribusi pada penyediaan fasilitas-fasilitas yang ada pada kawasan proyek pengembangan.
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Langsa (Disdikbud).	Terkait kegiatan pendidikan yang memanfaatkan hutan.	Melaksanakan *studytour*, penyuluhan bahkan perlombaan yang memanfaatkan kawasan hutan sebagai media pembelajaran siswa.
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa (BAPPEDA)	Terkait beberapa perencanaan pembangunan daerah.	Berperan dalam merancang arah pembangunan kawasan wisata melalui Musrenbang Kota serta mendukung

E-ISSN : 2775-443X
P-ISSN : 2775-4421

			kebijakan tata ruang pengembangan kawasan wisata.
7	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Langsa (BPKAD).	Terkait dalam kontribusi PT. Pekola untuk pendapatan asli daerah (retribusi PAD).	Melakukan pengawasan terhadap kontribusi PT. Pekola sebagai penyetor PAD serta mengatur pengelolaan aset milik daerah yang digunakan dalam proyek pengembangan ini.
8	Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Kota Langsa (UPTD KPH).	Terkait secara langsung dengan Ekowisata Hutan Mangrove Langsa, namun tidak terkait sama sekali dengan RTH Taman Hutan Kota Langsa.	Membantu konsultasi dalam perencanaan, melakukan monitoring atau pengawasan teknis dan administratif kawasan Ekowisata Hutan Mangrove dalam lingkup provinsi.
9	Dinas Komunikasi & Informatika Kota Langsa.	Terkait beberapa aset bangunan, fasilitas ataupun perlengkapan di RTH Hutan Kota dan Ekowisata Hutan Mangrove.	Mendukung penyediaan sarana komunikasi dan promosi kawasan wisata melalui publikasi informasi, pemasangan jaringan Wi-fi atau media informasi lainnya.
10	Komunitas Penggiat Alpukat (KPA)	Kerja sama terkait profit (saling menguntungkan).	Melaksanakan kegiatan pelestarian lingkungan seperti penanaman pohon alpukat di kawasan RTH Taman Hutan Kota sebagai bentuk kontribusi komunitas terhadap keberlanjutan kawasan hijau.
11	Masyarakat Sekitar	Terkait penyediaan lapangan kerja seperti parkir, kantin, asongan, café dll.	Hubungan saling menguntungkan.

Sumber: Hasil wawancara (2025)

b. Matriks Hubungan Interaksi Antar Stakeholders

E-ISSN : 2775-443X
P-ISSN : 2775-4421

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis terhadap bentuk interaksi dan kerjasama maka pola interaksi *stakeholders* digambarkan dalam bentuk matriks untuk memperjelas hubungan antar instansi dengan PT. Pekola (perseroda). Matriks hubungan antar *stakeholders* diperlihatkan pada Gambar 2.

STAKEHOLDERS	PT. PEKOLA	DLHK	Disporapar	Dinas PUJR	DPPKP	DISDIKBUD	BAPPEDA	BPKAD	UPTD KPH	DISKOMINFO	KPA	Masyarakat Sekitar
PT. Pekola		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DLHK	✓		✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-
Disporapar	✓	✓		-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUPR	✓	-	-		-	-	✓	-	-	-	-	-
DPPKP	✓	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
DISDIKBUD	✓	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
BAPPEDA	✓	-	-	✓	-	-		-	-	-	-	-
BPKAD	✓	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
UPTD KPH	✓	✓	-	-	-	-	-	-		-	-	-
DISKOMINFO	✓	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
KPA	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Masyarakat Sekitar	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Gambar 2. Matriks hubungan interaksi antar *stakeholders*
Sumber: Hasil wawancara (2025)

Hubungan antar-*stakeholders* yang kompleks tersebut menunjukkan adanya kebutuhan akan sistem koordinasi yang lebih terintegrasi. Oleh karena itu, diperlukan analisis konseptual untuk menyederhanakan dan menata ulang hubungan tersebut agar lebih terstruktur dan sistematis, penguatan mekanisme komunikasi dan penataan struktur kerja lintas instansi agar pelaksanaan proyek pengembangan kawasan wisata dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

c. Konsep Interaksi Antar Stakeholders (Soft System Methodology)

Hasil identifikasi *interface* dan hubungan interaksi antar-stakeholders pada proyek pengembangan kedua kawasan hutan menunjukkan bahwa kerja sama yang terjalin masih bersifat kompleks dan belum terstruktur dengan baik. Beberapa *stakeholders* bahkan menjalankan kegiatan secara individual tanpa mempertimbangkan keterkaitan dengan infrastruktur lain di sekitarnya. Untuk mengatasi kondisi tersebut, PT. Pekola perlu melakukan pendekatan *soft system thinking. Soft System Methodology (SSM)* ini berfungsi untuk menggambarkan dan menjelaskan kompleksitas sistem pengelolaan proyek secara komprehensif dalam kerangka system thinking. Langkah – langkah SSM yang dilakukan pada penelitian ini terdiri dari 4 langkah, yaitu:

1. Deskripsi situasi masalah

Berdasarkan hasil analisis data, ditemukan bahwa terdapat banyak pihak yang terlibat dalam proyek pengembangan kawasan Hutan Kota dan Hutan Mangrove, sehingga hubungan interface dalam pengelolaan kawasan ini menjadi sangat kompleks. Kondisi ini mempertegas adanya permasalahan dalam manajemen *interface*, namun masih perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai penyebab terjadinya masalah. Deskripsi situasi masalah merangkum beberapa hal yang harus diperbaiki di proyek pengembangan kawasan Hutan Kota dan Hutan Mangrove, antara lain:

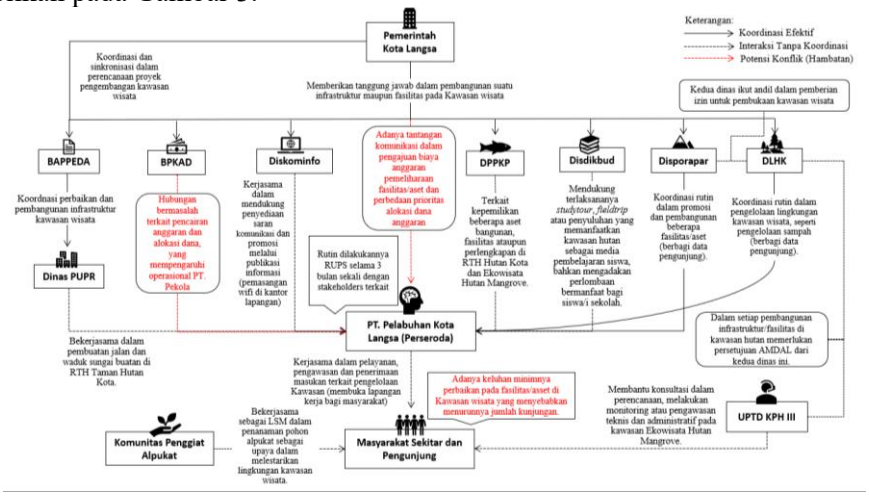
- Kurangnya biaya operasional (rekonstruksi) untuk kerusakan fasilitas, dikarenakan hal ini menyebabkan penurunan jumlah pengujung.

E-ISSN : 2775-443X
P-ISSN : 2775-4421

- Masing-masing *stakeholder* bekerja sendiri (parsial) sesuai perintah dari Pemko, PT. Pekola hanya sebagai pengelolah dan pengawas kawasan wisata.
- Belum adanya peraturan atau regulasi yang sistematik antara PT. Pekola dengan *stakeholders* terkait, hanya kontrak kerja jika sedang bekerja sama dalam suatu proyek pembangunan.
- Penurunan jumlah pengunjung mengakibatkan berkurangnya pendapatan termasuk konstribusi pendapatan asli daerah (PAD), kondisi ini pada beberapa kesempatan dapat mendorong terjadinya pengurangan jumlah pegawai.
- Untuk informasi data, PT. Pekola membagikan beberapa data sesuai permintaan *stakholder*s terkait.
- Komunikasi antara PT.Pekola dengan *stakholders* terkait dilakukan secara rutin dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).

2. *Rich Picture* atau pemetaan masalah

Untuk memperjelas gambaran hubungan interaksi tersebut serta mengidentifikasi situasi masalah secara menyeluruh, kondisi eksisting pengelolaan kawasan kemudian dituangkan dalam bentuk *Rich Picture* atau pemetaan masalah, sebagaimana ditampilkan pada Gambar 3.



Gambar 3. *Rich picture* (situasi masalah interaksi)

3. *Root Definition* dan elemen *CATWOE*

Setelah dibuatnya rich picture yang membantu untuk mendefisikan secara ringkas bagaimana situasi baru yang diinginkan bagi sistem interaksi pada pengembangan kawasan wisata tersebut. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah *root definition* dan elemen *CATWOE*. *Root Definition* merupakan pendefinisian kata-kata kunci ke dalam bentuk jalan proses bisnis secara tekstual dan ringkas. Berdasarkan tujuan penelitian dan memperhatikan situasi masalah *interface*, maka *root definition* pada proyek pengembangan kawasan RTH Taman Hutan Kota dan Ekowisata Hutan Mangrove Langsa adalah PT. Pekola sebagai pihak pengelola proyek pengembangan kawasan RTH Taman Hutan Kota dan Ekowisata Hutan Mangrove Langsa melakukan hubungan komunikasi dan koordinasi bersama *stakeholders* terkait dengan cara membangun interaksi yang aktif, sistem komunikasi yang terstruktur dan berbagi informasi yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya *interface problems*, baik *financial problem* maupun *enviromental problem* seperti yang sudah terjadi saat ini.

Selanjutnya *root definiti*on dipetakan untuk mendapatkan elemen-elemen pada sistem dengan menggunakan elemen *CATWOE (Customers, Actors, Transformation, World view, Owners, dan Environmental constraints)*. Elemen *CATWOE* dan deskripsi masing-masing *stakeholders* dijabarkan pada Tabel 4, sebagai berikut:

E-ISSN : 2775-443X
P-ISSN : 2775-4421

Tabel 4. Identifikasi elemen *CATWOE*

Elemen CATWOE	Deskripsi
Costumers	Masyarakat, pengunjung kawasan wisata sebagai penerima manfaat langsung serta komunitas lokal (misalnya Komunitas Penggiat Alpukat, dll).
Actors	PT. Pelabuhan Kota Langsa (Perseroda) sebagai pengelola utama kawasan wisata RTH Taman Hutan Kota dan Ekowisata Hutan Mangrove Kota Langsa.
Transformations	Mengubah dukungan anggaran, kebijakan, dan partisipasi masyarakat menjadi kawasan wisata yang terkelola dengan baik, edukatif dan konservatif yang memberikan manfaat lingkungan, sosial, dan ekonomi secara berkelanjutan, sehingga meningkatkan jumlah pengunjung serta kontribusi terhadap PAD.
World View	Pengembangan kawasan wisata dipandang penting tidak hanya sebagai sektor ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pelestarian lingkungan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan citra Kota Langsa sebagai kota wisata berbasis alam dan budaya.
Owners	Pemerintah Kota Langsa sebagai pemilik kewenangan utama dalam kebijakan, regulasi, dan alokasi anggaran, DPRD dalam fungsi persetujuan anggaran.
Enviromental Constraints	Keterbatasan anggaran, konflik kepentingan antar dinas, minimnya koordinasi lintas instansi, ketergantungan terhadap dukungan pemerintah daerah, serta faktor eksternal seperti kondisi cuaca, bencana alam, dan perubahan tren wisata.

Dengan demikian, *root definition* ini menjadi dasar dalam penyusunan model konseptual sistem ideal yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan *interface* antar *stakeholder*s dalam pengembangan Hutan Kota dan Ekowisata Mangrove.

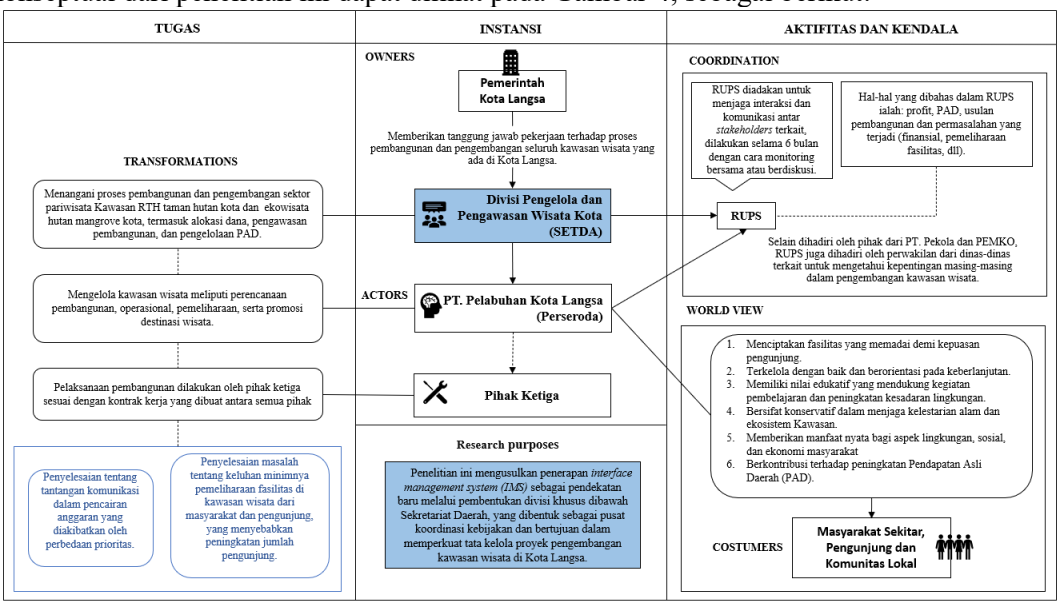
4. Model Konseptual

Berdasarkan *root definition* yang telah dirumuskan, selanjutnya dilakukan penyusunan model konseptual yang menggambarkan sistem ideal pengelolaan kawasan wisata Hutan Kota dan Ekowisata Mangrove di Kota Langsa. Model konseptual ini disusun untuk memperlihatkan bagaimana interaksi antar *stakeholders* seharusnya berjalan secara terkoordinasi dan saling mendukung, sehingga permasalahan *interface* yang selama ini terjadi dapat diminimalisir. Model konseptual yang disusun dalam penelitian ini tidak hanya menggambarkan pola interaksi antar *stakeholders* dalam pengelolaan kawasan wisata Hutan Kota dan Ekowisata Mangrove Kota Langsa, tetapi juga memberikan usulan perbaikan sistem yang dapat diterapkan ke depan. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa banyaknya aktor yang terlibat dalam pengelolaan kawasan justru menimbulkan kompleksitas sistem, sehingga sering kali memunculkan permasalahan *interface*. Kompleksitas ini tampak dari adanya tumpang tindih kewenangan, keterlambatan koordinasi, serta kesulitan dalam mengintegrasikan keputusan lintas dinas.

Dengan adanya model konseptual ini, diharapkan pola koordinasi dan komunikasi antar *stakeholders* dapat lebih jelas dan terstruktur. Selain itu, model ini juga berfungsi sebagai alat analisis untuk mengidentifikasi titik lemah dalam sistem yang sedang berjalan,

E-ISSN : 2775-443X
P-ISSN : 2775-4421

sekaligus menjadi dasar bagi perbaikan pengelolaan kawasan wisata secara berkelanjutan. Model konseptual dari penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 4, sebagai berikut:



Gambar 4. Model konseptual

4. Kesimpulan dan Saran

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis menggunakan pendekatan *Soft Systems Methodology* (SSM), penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Kawasan Taman Hutan Kota dan Ekowisata Hutan Mangrove di Kota Langsa telah berjalan dengan melibatkan berbagai *stakeholders* sesuai peran dan kewenangannya. PT. Pelabuhan Kota Langsa (Perseroda) berperan sebagai pengelola operasional, sementara Pemerintah Kota Langsa dan perangkat daerah terkait menjalankan fungsi kebijakan, perencanaan, penganggaran, perizinan, serta pengawasan lingkungan. Namun, pola interaksi antar *stakeholders* masih bersifat sektoral dan administratif, dengan perbedaan intensitas hubungan serta koordinasi lintas sektor yang masih memerlukan penguatan dan penyempurnaan agar pelaksanaan proyek pengembangan dapat berjalan lebih efektif dan meminimalisir terjadinya permasalahan interface. Hasil penelitian juga mengidentifikasi aspek-aspek hubungan interaksi yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan kawasan, yaitu jenis interaksi, waktu kerja sama, tingkat ketergantungan antar lembaga, manajemen data, sistem manajemen aset, serta regulasi kontrak kerja.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini mengusulkan penerapan *Interface Management System* (IMS) melalui pembentukan divisi atau bidang koordinatif di bawah Sekretariat Daerah Kota Langsa sebagai pusat pengelolaan interaksi antar *stakeholders* di sektor pariwisata. Usulan ini bertujuan untuk menyederhanakan pola koordinasi, memperjelas peran dan kewenangan, serta meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan dalam pengelolaan kawasan wisata. Dengan pengelolaan interaksi yang lebih terstruktur dan terintegrasi, diharapkan pengelolaan Kawasan Taman Hutan Kota dan Ekowisata Hutan Mangrove di Kota Langsa dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan selaras dengan tujuan pembangunan pariwisata daerah.

4.2 Saran

Bagi pemerinta Kota Langsa, disarankan untuk membentuk divisi koordinatif di bawah Sekretariat Daerah yang secara khusus menangani pengelolaan dan pengawasan kegiatan kepariwisataan. Divisi ini perlu didukung oleh sistem informasi terintegrasi agar

E-ISSN : 2775-443X
P-ISSN : 2775-4421

koordinasi antar instansi lebih cepat, efisien, dan transparan. Bagi PT. Pelabuhan Kota Langsa (Perseroda), diharapkan untuk meningkatkan kapasitas manajemen internal dalam hal perencanaan strategis, pengelolaan keuangan, dan evaluasi kinerja. PT. Pekola juga perlu memperkuat komunikasi dengan dinas-dinas terkait agar pelaksanaan program selaras dengan kebijakan pembangunan daerah. Bagi dinas-dinas terkait, diharapkan untuk memperkuat kolaborasi dengan PT. Pekola melalui forum komunikasi rutin dan mekanisme kerja sama yang lebih formal. Pendekatan kolaboratif akan mengurangi risiko tumpang tindih tanggung jawab dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan proyek. Sedangkan bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas fokus penelitian dengan menganalisis keterkaitan antara *IMS*, kebijakan pembangunan daerah, serta aspek sosial-ekonomi masyarakat di sekitar kawasan wisata. Kajian yang lebih mendalam akan membantu merancang model *IMS* yang lebih aplikatif dan berkelanjutan di tingkat daerah.

Ucapan Terima Kasih

Pada kesempatan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing skripsi saya, seluruh dosen dalam lingkungan prodi teknik sipil, kedua orang tua saya yang telah memberi do'a dan dukungan moral, serta semua rekan-rekan mahasiswa teknik sipil 2021 yang telah membantu penulis selama perkuliahan dan dalam menyelesaikan skripsinya.

Daftar Kepustakaan

A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® guide). (2013). Project Management Institute, Inc.

Bukit, I. N. M., Marzuki, P. F., Tamin, R. Z., & Meifriandi. (2019). *Stakeholders Interaction Framework of Utilities Development in and Adjacent to the Public Right of Way in Indonesia. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*.

Chan, W. T., Chen, C., Messner, J. I., & Chua, D. K. H. (2005). *Interface Management for China's Build-Operate-Transfer Projects. Journal Of Construction Engineering And Management* , *131*(6), 645–665.

Checkland, P. (2000). *Soft Systems Methodology: A Thirty Year Retrospective*. *Systems Research and Behavioral Science*, S11–S58.

Karay, J., Manongga, D., & Purnomo, H. D. (2020). Penerapan Soft System Methodology dalam Ekstraksi Pengetahuan Tentang Akreditasi Universitas XYZ. *Jurnal Sistem Informasi Bisnis*, *10*(2), 180–187. https://doi.org/10.21456/vol10iss2pp180-187

Neneng, I., Bukit, M., Farida Marzuki, P., Tamin, R. Z., & Wiratmadja, I. I. (n.d.). *Interface Management Pada Inter-Public Infrastructures System Ruang Milik Jalan*. *12*(1), 2023–2070.

Neneng, I., Bukit, M., Masthura, L., Fahriana, N., Ardhyan, M. Z., Yusri Nadya,), & Salsabila, S. (2025). Pola Koordinasi *Stakeholder* Pada Pengelolaan Hutan Kota Langsa *Stakeholders* Coordination Pattern In Managing Kota Langsa's Forest Project. *Jurnal Media Teknik Sipil Universitas Samudra (JMTS)*, *6*(1), 12–26.

Shokri, S., Haas, C. T., Haas, R. C. G., & Lee, S. H. (2016). *Interface-Management Process for Managing Risks in Complex Capital Projects. Journal of Construction Engineering Management*, 142 (2).

Shokri, S., Safa, M., Haas, C. T., Haas, R. C. G., Maloney, K., & Macgillivray, S. (2012). *Interface Management Model for Mega Capital Projects*.

Wang, J., & Aenis, T. (2019). *Stakeholder analysis in support of sustainable land management: Experiences from southwest China*. *Journal of Environmental Management*, *243*, 1–11. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2019.05.007

E-ISSN : 2775-443X
P-ISSN : 2775-4421